

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI



**Nama : Elia Oktarina
NIM : 222016122**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2020**

**ANALISIS RASIO KEUANGAN DALAM MENGUKUR KINERJA
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH SE-KABUPATEN/KOTA PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



Nama : Elia Oktarina

NIM : 222016122

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Elia Oktarina
NIM : 222016122
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik
Judul Skripsi : Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Sarjana Strata Satu baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang Agustus 2020
METERAI
TEMPEL
03D5BAHF529329539
6000
TUWAN BIRUPEK
Elia Oktarina

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah
Palembang

TANDA PENGESAHAN USULAN PENELITIAN

Judul : Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
Nama : Elia Oktarina
Nim : 222016122
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Mata Kuliah Pokok : Akuntansi Sektor Publik

Diterima dan Disahkan
Pada, Mei 2020

Pembimbing I



Drs. Sunardi, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0206046303/784021

Pembimbing II



Nina Sabrina, S.E., M.Si
NIDN/NBM:0216056801/851119

Mengetahui,
Dekan

u.h Ketua Progam Studi Akuntansi



Betri Sirajuddin, S.E., Ak., M.Si., CA
NIDN/NBM:0216106902/944806

PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Motto :

- ❖ *“Ketika Allah Memudahkan Usahamu Saat ini, Ketahuilah Sesungguhnya Allah mengetahui niatmu yang Tulus dan Terdalam Untuk Membahagiakan Orang Tuamu dan keluargamu.*
- ❖ *Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. (QS. Al-Baqarah:286)*

*ku ucapka syurut tiada henti atas
nikmat yang diberikan*

Allah Swt,ku persembahkan untuk :

- ❖ *Ayah dan ibunda tercinta*
- ❖ *Saudaraku tercinta*
- ❖ *Dosen-dosenku tersayang*
- ❖ *Teman-temanku tersayan,*
- ❖ *Almamaterku yang kubanggakan*

PRAKATA



Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpah segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan**” dengan tepat waktunya. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang .

Pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta terutama Ayahanda Johan dan Ibunda Zunaimah, serta saudaraku yang selalu memberika dukungan serta doa yang tiada hentinya. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada bapak Drs._Sunardi, S.E., M.Si dan Ibu Nina Sabrina, SE.,M.Si selaku pembimbing skripsi yang sangat sabar membimbing dan memberikan arahan serta saran-saran dengan tulus dan ikhlas dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penyajian yang tak lain disebabkan oleh keterbatasannya kemampuan yang penulis miliki. Selain itu, disampaikan juga terima kasih pada

pihak-pihak yang mengizinkan, membantu penulis dalam penyelesaian studi ini dan tidak lupa juga penulis menyampaikan ucapan terima bannyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli S.E.,M.M, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Drs. H. Fauzi Ridwan ,M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Betri Sirajuddin, S.E.,Ak.,M.Si.CA selaku Ketua Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku Sekertaris Jurusan Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang
5. Bapak Drs._Sunardi, S.E., M.Si selaku pembimbing I skripsiku
6. Ibu Nina Sabrina, S.E.,M.Si selaku pembimbing II skripsiku
7. Bapak Muhammad Pahmi, S.E., M.Si selaku pembimbing akademik
8. Bapak dan ibu dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta para staf dan karyawan
9. Saudara-saudara yag telah banyak membantu dan memberikan suport dalam penulisan skripsi ini
10. Teman-teman seperjuanganku angkatan 2016
11. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini.

Semoga Allah SWT membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Akhir kata penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, kesempurnaan hanya milik Allah SWT dan kekurangan milik penulis. Harapan penulis semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca. *Amin ya rabbal alamin*

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Palembang,

Agustus 2020

Elia Oktarina

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN DEPAN/COVER	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
PRAKATA	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTARTABEL.....	xii
DAFTAR Grafik	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	13
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Landasan Teori.....	14
1. Rasio Keuangan	14
2. Kinerja Keuangan.....	22
3. Pengelolaan Keuangan Daerah APBD.....	24
4. Laporan Realisasi Anggaran	27
B. Penelitian Sebelumnya	33

BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian.....	36
	B. Lokasi Penelitian.....	37
	C. Operasional Variabel.....	37
	D. Data yang Diperlukan	37
	E. Metode Pengumpulan Data.....	38
	F. Analisis Data	40
	G. Tehnik Analisis	42
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	
	A. Hasil Penelitian	43
	1. Sejarah Singkat Provinsi Sumatera Selatan	43
	2. Kondisi Geografis, Sosial dan Budaya	43
	3. Gambaran Umum Badan Pmeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan.....	47
	4. Data Penelitian	49
	B. Pembahasan Hasil Penelitian	51
	1. Rasio Efektivitas	51
	2. Rasio Efesiensi	54
	3. Rasio Pertumbuhan	57
	4. Rasio Kemandirian.....	60
	5. Rasio Keserasian	64
	6. Kinerja Keuangan pemerintah Yang Baik	73
	7. Peringkat kinerja keuangan pemerinta	74
BAB V	SIMPULAN DAN SARAN	
	A. Simpulan	76
	B. Saran.....	77
	DAFTAR PUSTAKA	78

DAFTAR TABEL

Tabel II.1	Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab /Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018	7
Tabel II.1	Kriteria Tingkat Efektivitas	16
Tabel II.2	Kriteria Kemampuan Efisiensi	17
Tabel II.3	Interval Rasio Pertumbuhan	19
Tabel II.4	Pola Hubungan dan Tingkat Kemandirian Daerah.....	20
Tabel II.5	Kriteria Rasio Keserasian Belanja.....	21
Tabel III.1	Operasional Variabel	37
Tabel IV.1	Laporan Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/Kota Provinsi Sumatera Selatan.....	48
Tabel IV.2	Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas	52
Tabel IV.3	Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi.....	55
Tabel IV.4	Hasil Perhitungan Rasio Pertumbuhan	58
Tabel IV.5	Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian	61
Tabel IV.6	Hasil Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Operasi	64
Tabel IV.7	Perhitungan Rasio Keserasian Belanja Modal	67
Tabel IV.8	Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Yang Baik	70
Tabel IV.9	Peringkat Kinerja Keuangan Kabupaten/Kota provinsi Sumatera Se- latan	72

Daftar Grafik

Tabel IV.3	Grafik Rasio Efektivitas	52
Tabel IV.5	Grafik Rasio Efisiensi	56
Tabel IV.7	Grafik Rasio Pertumbuhan	58
Tabel IV.9	Grafik Rasio Kemandirian.....	61
Tabel IV.11	Grafik Rasio Keserasian Belanja Operasi	65
Tabel IV.13	Grafik Rasio Keserasian Belanja Modal	68

Abstrak

Elia Oktarina/222016122/2020/ Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan/Akuntansi Sektor Publik.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan jika diukur dari rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, dan rasio keserasian dan Kabupaten/Kota manakah yang memiliki kinerja keuangan yang paling baik. Penelitian ini termasuk penelitian komparatif yaitu membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah analisis dokumen. Analisis data yang digunakan adalah analisis kuantitatif dan kualitatif. Hasil analisis menunjukkan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten/kota Provinsi Sumatera Selatan diukur rasio efektivitas sebesar 95%, rasio efisiensi 93%, rasio pertumbuhan 10%, rasio kemandirian 12%, rasio keserasian belanja operasi 64%, rasio keserasian belanja modal 36% dan kinerja keuangan yang paling baik adalah Kabupaten Palembang

Kata Kunci: Kinerja Keuangan Pemerintah daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian, dan Rasio keserasian Belanja

Abstract

Elia Oktarina/222016122/2020/The Analysis of Financial Ratios in Measuring the Financial Performance of Local Government in Regency/city of South Sumatera Province/Public Sector Accounting.

The problem formulation in this research was how the District/City financial performance in South Sumatera province measured from the effectiveness ratio, efficiency ratio, growth ratio, self-reliance ratio, and compatibility ratio and which district/city had the best financial performance. This study was comparative research that which is comparing one variable with another or one variable with a standard. The data used in this study was secondary data, while the method of data collection in this study was document analysis. The data analysis used was quantitative and qualitative analysis. The analysis results showed the financial performance of the Regency/city of South Sumatra province measured the ratio of effectiveness was 95%, efficiency ratio was 93%, growth ratio was 10%, self-reliance ratio was 12%, operating spending compatibility ratio was 64%, capital expenditure compatibility ratio was 36% and the best financial performance was Palembang.

Key words: *Local government's financial performance, effectiveness ratio, efficiency ratio, growth ratio, self-reliance ratio, and shopping harmony ratio*

PENGESAHAN
NO. 258 / Abstrak / LB/UMP/ 18 / 20 20
Telah di Koreksi oleh
Lembaga Bahasa
Universitas Muhammadiyah Palembang 9a

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik, khususnya di Indonesia semakin pesat dengan adanya era baru dalam pelaksanaan pengelolaan anggaran. Pengelolaan keuangan sangat besar pengaruhnya terhadap nasib suatu kota karena dapat menjadi suatu kota yang kuat serta mampu berkembang atau tidak, tergantung pada cara mengelola keuangannya. Pengelolaan kinerja pada anggaran yang baik kan membuat kota tersebut terjaga keuthannya. Pemberian hak otonomi daerah kepada Pemerintah untuk menentukan anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensinya mempertegas semakin diperlukannya pengelolaan keuangan yang baik dan benar, untuk melihat seberapa baik dan benarnya suatu pengelolaan keuangan maka perlu dilakukan pengukuran kinerja keuangan.

Pemerintah pusat maupun daerah merupakan pihak yang diberi tugas untuk menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan layanan sosial kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan wewenang, diperlukan pembiayaan dengan memungut berbagai macam jenis pendapatan dari masyarakat, kemudian membelanjakannya untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Fungsi pokok pemerintah terdiri dari tiga hal, yakni fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. Awalnya ketiga fungsi tersebut menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat, namun dalam proses penciptaan sistem pemerintahan yang lebih efektif dan efisien melalui desentralisasi daerah, sebagian besar wewenang dan tanggung jawab pemerintah pusat dilimpahkan/didesentralisasikan kepada pemerintah daerah. Namun perlu diingat, tidak semua fungsi wewenang pemerintah daerah dalam mengatur perekonomian secara makro melalui kebijakan fiskal baik melalui pengeluaran pemerintah, perpajakan dan subsidi yang bersifat nasional. (Khusaini, 2018:4).

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan daerah. Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Keuangan daerah selain diatur dengan peraturan pemerintah juga mengikuti peraturan menteri dan keuangan daerah juga mengikuti anggaran pendapatan dan belanja daerah masing-masing daerah yang disinkronkan dan dikelola secara sistematis.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan menggunakan pendekatan kinerja menjelaskan bahwa proses perencanaan dan penganggaran dalam pemerintah daerah yang berfokus pada pos belanja/pengeluaran pada kinerja terukur dari aktivitas dan program kerja. Terdapatnya tolak ukur dalam pendekatan ini akan mempermudah pemerintah daerah dalam melakukan pengukuran kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Karakteristik dari pendekatan ini adalah proses untuk mengklasifikasikan anggaran berdasarkan kegiatan dan juga berdasarkan unit organisasi.

Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan yang akan digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Laporan keuangan untuk mendukung pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik tersebut meliputi informasi yang digunakan untuk membandingkan kinerja keuangan yang aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, membantu dan mengevaluasi efisiensi dan efektifitas. (Kawatu, 209:6)

Fungsi utama dari laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk memberikan informasi keuangan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan

keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Sebagaimana telah disinggung pada bagian awal bahwa penggunaan laporan keuangan meliputi berbagai kalangan, baik yang dikategorikan sebagai pengguna internal maupun eksternal. (Mahmudi,2019:9).

Keuangan Negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan obyek sebagaimana mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggung jawaban. Dari sisi tujuan, keuangan Negara meliputi seluruh kebijakan, (Pamungkas,2014:38)

kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilik atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut di atas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara. (Pamungkas,2014:38)

Salah satu metode yang biasa digunakan untuk menganalisa laporan keuangan adalah analisis rasio, analisis rasio merupakan cara analisa dengan menggunakan perhitungan perbandingan dari data kuantitatif yang terdapat dalam neraca maupun laporan laba rugi. Pada umumnya perhitungan rasio-rasio data keuangan adalah guna menilai kinerja dimasalalu dan berbagai kemungkinan dimasa depan. (Hartono, 2018:8)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu provinsi dipulau Sumatera yang terdiri dari empat Kota dan tiga belas Kabupaten. Gubernur Sumatera Selatan merupakan kepala pemerintahan dalam

menjalankan kinerja dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah (BPKAD) Provinsi Sumatera Selatan.

Menurut situs web resmi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan perwakilan Provinsi Sumatera Selatan beberapa Kabupaten/Kota yang memperoleh opini WDP (wajar dengan pengecualian) atau belum sepenuhnya optimal seperti kabupaten Ogan Komering Ilir, Kab OKU Selatan, Kab Lahat, Ogan Komering Ulu, Musi Rawas dan Kota Pagar Alam.

Belum diperolehnya opini WTP (wajar tanpa pengecualian) dari BPK menunjukkan bahwa pelaporan keuangan pemerintah daerah masih belum sepenuhnya dapat diyakini kewajarannya oleh BPK yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain adanya belum tertatanya barang milik Negara/Daerah yang tertib, tidak sesuainya pelaksanaan pegadaan barang dan jasa dengan ketentuan yang berlaku, peyajian laporan keuangan yang belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, kelemahan dalam sistem penyusunan laporan keuangan dan kurang memadainya kompetensi SDM dalam mengelola keuangan pada pemerintah daerah.

Dalam rangka peringkatan kualitas laporan keuangan Pemerintah daerah telah disarankan kepada masing-masing kepala daerah serta perlu dilakukan langkah-langkah identifikasi penyebab menempatkan personal yang

kompeten dan menyusun *kegiatan* untuk langkah perbaikan kualitas laporan keuangan. (www.bpkp.go.id)

Penelitian sebelumnya dilakukakn oleh Hery Susanto (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rasio Efektivitas kota mataram tahun anggaran 2013-2015 dikategorikan cukup efektif hal ini menggambarkan bahwa efektivitas pemerintah daerah mataram dalam merealisasikan sumber pendapatan sangat efektif namun tingkat efesiensi dikategorikan kurang efisien karena persentase dibawah seratus . hal ini menggambarkan bahwa pemerintah kota Mataram mengeluarkan biaya yang lebih besar dalam pengelolaan keuangan yang belum optimal.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Putri Kemala (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemandirian Pemerinatah daerah Kabupaten Labuhan Batu tergolong masih cukup rendah sekali . pada rasio aktivitas tahun 2011-2013 menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan belanja pembangunan. Pertumbuhan PAD menunjukkan kinerja pemerintah tidak baik. Hal ini ditunjukkan dari rata-rata pertumbuhan PAD yang bernilai negatif.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Rigel Nurul Fatah (2017). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kinerja keuangan Daerah Kabupaten

GunungKidul jika dilihat dari rasio efektivitas tergolong efektif, karena rata-ratanya efektivitasnya di atas 100%. Pada tingkat efisiensi keuangan daerah belum efisien karena lima tahun berturut-turut skalanya diatas 100%. Rasio keserasian masih banyak mengalokasikan belanja operasi daripada belanja modalnya

Berikut ini disajikan mengenai Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan periode 2015-2018.

Tabel I.1
Laporan Anggaran Dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Kab/kota
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015-2018

No	Kabupaten/Kota	Tahun	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
			Pendapatan	Pendapatan	Belanja	Belanja
			(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)	(Ribuan Rupiah)
1.	Palembang	2015	2.870.202.481	2.871.899.610	3.146.444.216	2.868.750.360
		2016	3.466.134.113	3.122.903.127	3.369.864.428	2.915.966.125
		2017	3.578.989.385	3.417.593.733	3.383.208.534	3.141.848.658
		2018	3.643.288.212	3.485.882.634	3.651.197.394	3.488.244.426
2	Muba	2015	2.506.193.141	2.034.401.344	2.364.027.425	1.899.319.701
		2016	2.849.225.683	2.640.255.197	2.516.296.929	2.516.296.929
		2017	2.876.720.007	2.642.776.006	2.566.618.015	2.340.644.994
		2018	2.703.265.186	3.019.699.825	3.203.365.186	2.958.060.291
3	Banyuasin	2015	1.833.573.044	1.540.083.544	1.755.075.142	1.540.083.544
		2016	2.180.253.159	1.951.227.051	1.909.404.888	1.602.242.344
		2017	2.014.566.266	2.006.422.252	2.566.618.015	2.340.644.994
		2018	1.948.005.479	2.080.649.009	2.035.556.230	1.992.040.769
4	Oki	2015	1.736.688.910	1.653.377.720	1.882.004.203	1.745.362.121
		2016	1.964.045.648	1.979.249.631	2.405.340.475	1.979.334.457
		2017	1.649.133.466	1.363.217.799	1.408.398.367	1.115.443.315
		2018	2.231.343.639	2.224.001.831	2.241.275.403	1.918.481.263
5	Ogan Ilir	2015	1.399.760.930	1.073.724.537	1.399.760.930	964.153.853
		2016	1.542.879.089	1.542.879.089	1.453.289.005	1.102.973.684

		2017	1.649.133.466	1.215.443.315	1.408.398.367	1.363.217.799
		2018	1.549.469.950	1.417.185.838	1.547.169.950	1.274.234.887
6	OKU	2015	1.109.603.969	1.034.793.698	1.220.349.843	1.085.467.499
		2016	1.241.663.992	1.192.981.912	1.192.981.912	993.279.511
		2017	1.416.035.133	1.396.244.570	1.297.686.974	1.186.374.978
		2018	1.311.311.318	1.412.521.909	1.463.688.662	1.419.173.692
7	OKU Selatan	2015	933.698.026	933.056.431	1.038.873.351	925.258.905
		2016	1.236.605.536	1.235.605.536	1.122.067.311	1.014.409.319
		2017	1.258.607.949	1.222.264.959	1.082.192.218	989.011.519
		2018	1.227.209.054	1.268.126.824	1.303.537.687	1.228.203.115
8	OKU Timur	2015	1.344.367.675	1.298.375.034	1.261.897.416	1.158.799.615
		2016	1.669.766.891	1.521.770.289	1.428.590.115	1.285.585.518
		2017	1.671.268.817	1.599.418.326	1.356.701.260	1.289.877.393
		2018	1.649.349.343	1.627.163.554	1.652.814.789	1.614.913.933
9	Muara Enim	2015	2.283.476.954	1.977.122.379	2.453.375.336	2.112.376.745
		2016	2.177.891.479	2.049.002.254	2.180.613.601	1.856.355.068
		2017	2.416.523.878	2.402.350.260	2.033.737.393	1.897.083.715
		2018	2.064.926.236	2.525.583.634	2.417.264.086	2.434.360.114
10	Prabumulih	2015	895.489.650	816.654.321	1.011.173.914	922.580.955
		2016	1.072.008.198	940.737.360	1.018.217.047	891.296.683
		2017	930.320.518	930.320.518	956.939.607	956.939.607
		2018	874.733.232	958.368.934	872.733.232	850.890.467
11	Lahat	2015	1.657.846.559	1.559.989.661	1.657.846.559	1.559.989.661
		2016	1.868.537.150	1.726.004.654	1.747.349.170	1.545.145.014
		2017	1.957.810.446	1.765.015.019	1.715.307.187	1.408.832.916
		2018	1.740.437.900	1.916.874.000	1.838.590.794	1.834.483.998
12	Pagar Alam	2015	816.005.973	747.658.414	904.406.482	795.537.900
		2016	874.003.600	814.062.290	945.858.698	797.621.810
		2017	888.544.891	812.270.609	893.475.825	743.610.049
		2018	817.250.572	769.448.437	826.658.246	655.603.214
13	Musi Rawas	2015	1.504.015.512	1.616.908.301	1.592.855.152	1.405.099.541
		2016	1.763.644.399	1.617.409.674	1.713.677.287	1.531.168.541
		2017	1.625.481.874	1.549.566.489	1.313.648.923	1.192.026.376
		2018	1.697.033.491	1.759.880.995	1.681.581.278	1.648.414.553
14	Lubuk Linggau	2015	861.092.232	821.900.180	896.317.650	821.639.554
		2016	975.225.201	883.629.694	896.856.354	809.943.066
		2017	1.002.530.943	906.258.990	967.151.199	870.709.076
		2018	952.999.507	923.898.833	868.799.507	859.995.202
15	Empat Lawang	2015	728.699.641	757.424.055	728.699.641	728.699.641
		2016	895.125.276	801.728.601	750.557.059	648.861.582
		2017	963.691.978	904.327.377	792.729.567	722.850.409
		2018	951.766.581	978.617.329	951.766.581	968.083.615
16	Muratara	2015	678.008.927	616.908.301	744.142.494	670.724.435

		2016	797.621.810	813.614.247	789.741.912	720.301.758
		2017	812.629.762	785.394.510	755.212.199	677.194.130
		2018	945.842.746	922.981.792	963.759.600	867.583.014
17	Pali	2015	717.518.854	605.979.409	733.798.654	622.474.176
		2016	893.929.818	806.302.689	821.589.125	743.680.887
		2017	1.022.757.87	992.302.734	928.100.489	865.926.979
		2018	1.356.800.901	1.226.434.373	1.580.900.901	1.359.663.867

Sumber : Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Sumatera Selatan 2020

Berdasarkan Tabel 1.1 Menunjukkan adanya permasalahan pada pendapatan yang mengalami turun naik atau fluktuatif yang terjadi pada kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan :

Tahun 2017 Kabupaten yang mengalami penurunan pendapatan daerah yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, penurunan tersebut dikarenakan pemerintah masih bergantung dari dana transfer ke daerah oleh pemerintah pusat sehingga menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi nasional. Selanjutnya penurunan pendapatan tahun 2017 juga terjadi pada kabupaten Oku selatan kondisi ini disebabkan oleh penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan mengalami penurunan karena kurangnya target pencapaian terhadap pendapatan asli daerah.

Tahun 2018 kabupaten yang mengalami penurunan ialah Kabupaten/Kota Pagar Alam kondisi yang menyebabkan pendapatan menurun di Kota Pagar Alam dikarenakan PAD tidak bisa dioptimalkan sudah mentok 5 persen sedangkan idealnya 20-25 persen PAD hal ini disebabkan karena

pemerintah masih bergantung pada dana transfer dari pusat daripada menggali sumber pendapatan di daerahnya.

Sedangkan Belanja Daerah juga mengalami turun naik atau fluktuatif dapat dilihat bahwa:

Tahun 2015 kabupaten yang mengalami kenaikan pada Belanja ialah Kabupaten Ogan Komering Ilir masalah ini disebabkan oleh pembangunan jaringan transmisi dan pembangunan jaringan listrik sehingga melebihi anggaran yang telah ditetapkan. Kabupaten/kota Pali juga mengalami kenaikan pada Belanja hal ini disebabkan adanya penyalagunaan yang berlebihan seperti belanja modal, gedung dan bangunan dan belanja aset tetap lainnya.

Tahun 2016 peningkatan belanja terjadi pada Kabupaten Ogan Komering Ilir hal ini disebabkan oleh terbakarnya 700ribu hektar lahan sumsel dan setengahnya berasal dari OKI sehingga dalam menstabilkan perekonomian dimasyarakat pemerintah memberikan bantuan sosial seta pelatihan untuk megembangkan kembali potensi sumber daya alamnya.

Tahun 2017 Kabupaten yang mengalami peningkatan pada belanja yaitu Kabupaten Banyuasin hal ini disebabkan oleh pengeluaran konsumsi akhir pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, dan penggunaan barang dan jasa meningkat. Selanjutnya pada kabupaten Ogan Ilir hal ini disebabkan oleh pembangunan jangka panjang sehingga menyebabkan kapasitas

keuangan daerah dan alokasi belanja daerah terus meningkat. Hal ini juga terjadi pada Kota Prabumulih dikarenakan adanya kerja sama pemerintah dengan pembangunan infrastruktur Cipta Karya yang dananya bersumber dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan daerah dengan tujuan untuk mendorong pemanfaatan sumber pendapatan nantinya.

Tahun 2018 Kabupaten yang mengalami kenaikan pada Belanja daerah ialah Kota Palembang hal ini disebabkan oleh perubahan anggaran untuk lahan pembangunan jembatan Musi IV dan Musi VI sehingga anggaran melebihi jumlah target. Hal ini juga terjadi pada Ogan Komering Ilir berdasarkan data statistik menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari pembangunan infrastruktur sehingga menyebabkan pembelanjaan meningkat. Kabupaten yang mengalami kenaikan pada belanja Kabupaten Pali hal ini disebabkan karena kabupaten pali baru melakukan pemekaran dan memperbanyak pembangunan infrastruktur di daerahnya.

Laporan realisasi anggaran ialah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, Alokasi dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah. Unsur yang dicakup secara langsung dari laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan L-RA, belanja, transfer dan pembiayaan. (Halkadri,2019)

Pengukuran kinerja keuangan untuk kepentingan publik sangat diperlukan sebagai evaluasi dan memulihkan kinerja dengan pembanding

skema kerja dan pelaksanaannya. Selain itu dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk peningkatan kinerja khususnya keuangan pemerintah daerah pada periode berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian dengan judul **“Analisis Rasio Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan jika di ukur dari rasio efektivitas, rasio efesiensi, dan rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, dan rasio keserasian?
2. Kabupaten/Kota manakah yang memiliki kinerja keuangan yang paling baik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja keuangan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan jika di ukur dari rasio efektivitas, rasio efesiensi, dan rasio pertumbuhan, rasio kemandirian, rasio keserasian.
2. Kabupaten/Kota yang memiliki kinerja keuangan yang paling baik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai bukti empiris yang ada tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi Almamater

Hasil penelitian tentang Hasil penelitian tentang pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah Se-Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan, diharapkan dapat menjadi referensi tambahan, menambah ilmu pengetahuan, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan *Retrieved Januari 29, 2020, from https://palembang.bpk.go.id/?page_id=19317*
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. (2017). *Kinerja Keuangan Daerah. Retrieved November 23, 2019, from <http://bpkad.Banjarkab.go.id/index.php/2017/09/07/kinerja-keuangan-daerah/>.*
- Dewi. Putri Kemala 2017 *Analisis rasio keuangan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Labuhan Batu Tahun anggaran 2011-2013. Jurnal Khitabah. Vol.1 No.1:43*
- D.Sumual 2017. *Analisi Pengukuran Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kota Tomohon. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern , Vol 12 No.2 :782-791*
- Djanegara. S. Moermahadi 2017. *Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penerbit Kasatuan Press. Bogor*
- Fitra. Halkadri 2019. *Analisis Neraca dan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Daerah. Penerbit CV IRDH*
- Hadi.Marmah dan Amrie Firmansyah. 2015 *Modul Kerjasama Peningkatan Kapasitas pengelolaan Keuangan Daaerah : Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta.*
- Halim.Abdul dan Muhammad Iqbal 2019. *Pengelolaan Keuangan Daerah. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta*
- Hartono.2018. *Konsep Analisa Laporan Keuangan dengan Pendekatan Rasio dan SPSS. Penerbit CV BUDI UTAMA. Yogyakarta*
- Hendawati,dkk .2017. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan di Pemerintah Daerah. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan, Vol.5 No. 3*
- Julian, Juddy 2017 *analisis rasio keuangan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Manado untuk menilai kinerja keuangan pemerintah kota Manado. Jurnal Accountability. Vol. 06 No.1 :45-56*
- Kawatu, Freddy Samuel. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Sektor Publik. Penerbit. CV Budi Utama*

Kementrian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>.

Khusaini. Muhammadiyah 2018. *Keuangan Daerah* . Penerbit UB Press

Mahmudi , 2019. *Analisis laporan keuangan pemerintah daerah*. Edisi ke 2 UPP STIK YKPN. Yogyakarta

Mahmudi. 2019. *Manajemen Kinerja keuangan*. Penerbit UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Mahsum. Muhammad 2016. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Penerbit BPFY- Yogyakarta.

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Miguel,dkk 2018. Efektivitas dan Efisiensi Penerimaan Daerah Distrik Dili. Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana. Vol.7 No.12 2535-2554

Nasution, Dito Aditia Darma. 2019. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit. Uwais Inspirasi Indonesia

Pahmi.Irham 2011 . *Analisis Kinerja Keuangan*. Penerbit. Alfabeta Bandung

Pamungkas. Bambang. 2013. *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. Kesatuan Press

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang pengelolaan

Permendagri Nomor 13 Tahun 2019 pasal 7 tentang Laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Pramono.Joko 2014 .. Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah . Among Makarti, Vol.7 No.13:110

Ratnasari. Cici, dkk 2013. *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan Berdasarkan Analisis Rasio Keuangan dan Economic Value Added (EVA)*. Jurnal Administrasi bisnis 2(1) :211

Rismawati,dkk 2018. *Evaluasi Kinerja Penilaian Kinerja Atas Dasar Prestasi Kerja Berorientasi Kedepan*. Peneribit. Celebes Media Perkasa

Fathah. Rigel Nurul 2017. *Analisis rasio keuangan untuk penilaian kinerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Gunung Kidul*. Jurn:al EBBANK. Vol. 8 No.1:47

Riyanto dan Puji Agus 2015. *Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual*. Peneribit: Pustaka Belajar

Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Penerbit Alfabeta, Bandung

Sujarweni, V. Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis & Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press

Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang pemerintahan Daerah